

## ANALISIS MANFAAT BANTUAN USAHA EKONOMI PRODUKTIF KOTA PALU DAN KABUPATEN SIGI

FARDILLAH YUYU WAHYUNI<sup>1\*</sup>, MUHAMMAD YUNUS KASIM<sup>2</sup>, YOHAN<sup>3</sup>, YUNUS  
SADING<sup>4</sup>, RITA YUNUS<sup>5</sup>

Program Studi Magister Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Tadulako

Corresponding Author: fardillahyuyuwahyuni@gmail.com\*

**Abstract:** *Poverty in Central Sulawesi remains above the national average, prompting the Productive Economic Enterprise (UEP) assistance programme as an empowerment strategy. This study analyses the benefit of UEP assistance and its feasibility in Palu City and Sigi Regency for 2022–2024. Using a descriptive mixed-methods design with 57 respondents selected through the Slovin formula, data were analysed using utility theory and Benefit-Cost Ratio (BCR). Results show that average income rose by IDR 842,982 per month (44.3%), with 89.5% of recipients gaining income. The overall BCR was 0.6267 (<1), economically not yet feasible within one year; however, Sigi Regency recorded a BCR of 1.0480 (>1). The programme is socially feasible and recommended to continue with strengthened mentoring.*

**Keywords:** *benefit-cost ratio; poverty alleviation; productive economic enterprise; utility; welfare.*

**Abstrak:** Kemiskinan di Sulawesi Tengah masih berada di atas rata-rata nasional sehingga mendorong pelaksanaan program bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) sebagai strategi pemberdayaan. Penelitian ini menganalisis nilai manfaat bantuan UEP dan kelayakannya di Kota Palu dan Kabupaten Sigi periode 2022–2024. Menggunakan desain deskriptif mixed methods dengan 57 responden yang dipilih melalui rumus Slovin, data dianalisis dengan teori utilitas dan Benefit-Cost Ratio (BCR). Hasil menunjukkan rata-rata pendapatan meningkat Rp842.982 per bulan (44,3%), dengan 89,5% penerima mengalami kenaikan pendapatan. Nilai BCR keseluruhan 0,6267 (<1) atau belum layak secara ekonomi dalam satu tahun; namun Kabupaten Sigi mencatat BCR 1,0480 (>1). Program dinilai layak secara sosial dan direkomendasikan dilanjutkan dengan penguatan pendampingan.

**Kata Kunci:** benefit-cost ratio; kemiskinan; pemberdayaan; usaha ekonomi produktif; utilitas.

### A. Pendahuluan

Kemiskinan merupakan masalah kompleks dan multidimensi yang tidak hanya menyangkut ketidakmampuan ekonomi, tetapi juga kegagalan pemenuhan hak-hak dasar manusia. Untuk menanganinya, pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, yang antara lain diwujudkan melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat berupa pemberian bantuan stimulan Usaha Ekonomi Produktif (UEP). Program UEP dirancang bukan sekadar bantuan modal konsumtif, melainkan investasi sosial yang ditujukan untuk meningkatkan pendapatan dan kemandirian usaha penerima manfaat (Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2019). Provinsi Sulawesi Tengah masih menghadapi tantangan kemiskinan yang serius dengan persentase penduduk miskin 11,77 persen pada Maret 2024, jauh di atas rata-rata nasional sebesar 9,03 persen. Kondisi ini diperparah dampak gempa, tsunami, dan likuefaksi 2018 yang menghancurkan mata pencaharian ribuan keluarga, khususnya di Kota Palu sebagai pusat perkotaan dan Kabupaten Sigi yang berbasis pertanian perdesaan.

Selama 2022–2024, Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah menyalurkan bantuan UEP kepada 136 penerima manfaat dengan distribusi yang sangat timpang, yaitu 128 penerima (94,1 persen) di Kota Palu dan hanya 8 penerima (5,9 persen) di Kabupaten Sigi, dengan nominal bervariasi antara Rp10.000.000 hingga Rp50.000.000. Disparitas distribusi ini menimbulkan pertanyaan kritis, terlebih Kabupaten Sigi memiliki persentase penduduk miskin yang lebih tinggi. Dalam konteks keterbatasan anggaran dan tuntutan akuntabilitas publik, evaluasi manfaat-biaya yang sistematis menjadi krusial untuk memastikan setiap rupiah belanja program memberikan dampak optimal bagi kesejahteraan masyarakat.

Penelitian ini dilandasi tiga kerangka teori. Pertama, teori utilitas yang memandang utilitas sebagai ukuran kepuasan atau manfaat yang diterima dari konsumsi barang dan jasa, dengan hukum pengurangan utilitas marjinal yang menyatakan bahwa tambahan modal memberi manfaat marjinal lebih besar pada penerima dengan modal dasar lebih rendah (Girikallo et al., 2023; Zakaria, 2012). Kedua, teori perangkap kemiskinan (deprivation trap) Robert Chambers yang menjelaskan kemiskinan sebagai keterkaitan lima unsur, yaitu kemiskinan, kelemahan jasmani, isolasi, kerentanan, dan ketidakberdayaan (Maipita, 2014). Ketiga, analisis manfaat-biaya melalui Benefit-Cost Ratio (BCR), yaitu perbandingan total manfaat dengan total biaya, di mana program dinyatakan layak apabila  $BCR \geq 1$  (Mangkoesebroto, 1998).

Berbagai penelitian terdahulu menunjukkan hasil yang beragam. Isnaeni et al. (2022) dan Syamsul Rizal (2023) menemukan program pemberdayaan ekonomi produktif meningkatkan penghasilan dan kesejahteraan penerima, sedangkan Nurrahma et al. (2022) serta Yosada (2019) menemukan bahwa bantuan modal tidak selalu berdampak pada pendapatan dan justru berisiko menimbulkan ketergantungan. Pada sisi evaluasi manfaat-biaya, Istari (2014) mengevaluasi program PNPM-MP dengan BCR sebesar 2,44 menggunakan arus kas lima tahun. Studi-studi ini sebagian besar bersifat kualitatif deskriptif dan jarang mengukur kelayakan ekonomi bantuan UEP secara kuantitatif melalui BCR pada konteks wilayah pasca bencana.

Kesenjangan inilah yang membedakan penelitian ini, yakni belum adanya kajian komprehensif yang mengukur besaran manfaat ekonomi bantuan UEP dibandingkan biaya yang dikeluarkan pemerintah di Kota Palu dan Kabupaten Sigi yang merepresentasikan karakteristik perkotaan dan perdesaan sekaligus wilayah pemulihan pasca bencana. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menghitung dan menganalisis nilai manfaat UEP yang diperoleh dari bantuan yang disalurkan, serta menganalisis kelayakan pelaksanaan program UEP dalam pengentasan kemiskinan di Kota Palu dan Kabupaten Sigi.

## **B. Metodologi Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan mixed methods, yang dilaksanakan di Kota Palu dan Kabupaten Sigi sebagai wilayah penerima bantuan UEP Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah periode 2022–2024. Populasi penelitian berjumlah 136 penerima manfaat, dan jumlah sampel ditentukan menggunakan rumus Slovin pada margin of error 10 persen sehingga diperoleh 57 responden yang terdiri atas 51 penerima di Kota Palu dan 6 penerima di Kabupaten Sigi. Data primer dikumpulkan melalui kuesioner terstruktur dan wawancara mendalam, sementara data sekunder bersumber dari dokumen dan laporan resmi Dinas Sosial. Analisis data dilakukan dengan mengoperasionalkan teori utilitas  $U = f(U_1; U_2)$ , di mana utility ekonomi ( $U_1$ ) diukur dari perubahan pendapatan absolut  $\Delta Y = Y_1 - Y_0$  dan utility kesejahteraan ( $U_2$ ) diukur secara deskriptif dari aspek kesehatan dan pendidikan, serta dilengkapi analisis Benefit-Cost Ratio (BCR) untuk menilai kelayakan ekonomi program dengan kriteria layak apabila  $BCR \geq 1$ .

## **C. Hasil dan Pembahasan**

### **Karakteristik Penerima Bantuan UEP**

Penerima bantuan UEP didominasi oleh perempuan sebanyak 37 orang (64,9 persen), yang mencerminkan kecenderungan program perlindungan sosial memprioritaskan perempuan sebagai pengelola ekonomi rumah tangga. Mayoritas responden berada pada usia produktif 40–49 tahun (42,1 persen) dengan rata-rata usia 46,2 tahun, dan sebagian besar berpendidikan SMA/SMK (59,6 persen). Sebanyak 82,5 persen responden berstatus menikah dan memiliki anak, dengan rata-rata 4,5 anggota keluarga. Dari sisi bantuan, mayoritas menerima nominal Rp10.000.000 (64,9 persen) dan paling banyak menerima pada tahun 2024 (68,4 persen). Tingkat pendidikan yang relatif rendah ini sejalan dengan teori Sharp dalam Kuncoro (2014), bahwa rendahnya kualitas angkatan kerja merupakan salah satu penyebab utama kemiskinan, sehingga pendampingan menjadi kebutuhan penting.

### Nilai Manfaat Ekonomi Program Bantuan UEP

Analisis utility ekonomi dilakukan dengan membandingkan pendapatan bulanan responden sebelum ( $Y_0$ ) dan sesudah ( $Y_1$ ) menerima bantuan UEP, sebagaimana disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1  
 Rata-rata Pendapatan Sebelum dan Sesudah Bantuan UEP

Keterangan	Nilai (Rp)
Rata-rata pendapatan sebelum bantuan ( $Y_0$ )	1.904.386
Rata-rata pendapatan sesudah bantuan ( $Y_1$ )	2.747.368
Rata-rata peningkatan pendapatan ( $\Delta Y$ )	842.982
<b>Persentase peningkatan</b>	<b>44,3%</b>

Sumber: Data primer diolah, 2025

Tabel 1 menunjukkan bahwa rata-rata pendapatan penerima meningkat dari Rp1.904.386 menjadi Rp2.747.368 per bulan, atau naik sebesar Rp842.982 per bulan (44,3 persen). Sebanyak 89,5 persen responden mengalami peningkatan pendapatan dan tidak ada satu pun yang mengalami penurunan. Peningkatan ini dapat dijelaskan melalui teori utilitas, di mana bantuan modal usaha menjadi tambahan sumber daya yang meningkatkan kapasitas produksi dan pada akhirnya pendapatan sebagai bentuk utilitas yang dirasakan penerima.

Temuan menarik muncul ketika manfaat dianalisis menurut wilayah. Meskipun pendapatan awal di Kabupaten Sigi lebih rendah (Rp1.558.333) dibandingkan Kota Palu (Rp1.945.098), Kabupaten Sigi justru mencatat peningkatan pendapatan lebih tinggi ( $\Delta Y$  Rp1.091.667) dibandingkan Kota Palu ( $\Delta Y$  Rp813.725). Fenomena ini konsisten dengan konsep utilitas marjinal yang menurun (Girikallo et al., 2023), bahwa tambahan modal memberikan utilitas marjinal lebih besar pada penerima dengan modal dasar lebih rendah. Temuan ini sejalan dengan Isnaeni et al. (2022) dan Syamsul Rizal (2023), namun perlu dilihat kritis seperti Nurrahma et al. (2022), mengingat 10,5 persen responden yang pendapatannya tetap mengindikasikan manfaat program tidak terdistribusi merata dan dipengaruhi lama usaha berjalan serta kapasitas pengelolaan.

### Kelayakan Ekonomi Program: Analisis Benefit-Cost Ratio

Analisis Benefit-Cost Ratio (BCR) digunakan untuk menilai kelayakan ekonomi program dengan membandingkan total manfaat berupa peningkatan pendapatan tahunan terhadap total biaya berupa nilai bantuan yang disalurkan. Hasil perhitungan BCR keseluruhan dan menurut wilayah disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2  
 Hasil Analisis BCR Keseluruhan dan per Wilayah

Kategori	n	Benefit (Rp)	Cost (Rp)	BCR
Kota Palu	51	498.000.000	845.000.000	0,5893
Kabupaten Sigi	6	78.600.000	75.000.000	1,0480
<b>Keseluruhan</b>	<b>57</b>	<b>576.600.000</b>	<b>920.000.000</b>	<b>0,6267</b>

Sumber: Data primer diolah, 2025

Tabel 2 menunjukkan bahwa secara keseluruhan program UEP menghasilkan BCR sebesar 0,6267 ( $< 1$ ), yang berarti setiap Rp1 biaya yang dikeluarkan pemerintah menghasilkan manfaat ekonomi sebesar Rp0,63 dalam satu tahun pertama, sehingga belum mencapai titik kelayakan ekonomi. Namun, kelayakan ini bersifat kontekstual. Kabupaten Sigi mencatat BCR 1,0480 ( $> 1$ ) sehingga telah layak secara ekonomi, bahkan kombinasi Kabupaten Sigi dengan nominal Rp10.000.000 menghasilkan BCR tertinggi sebesar 1,2600. Hal ini menegaskan bahwa kelayakan program bergantung pada konteks wilayah dan besaran nominal bantuan, di mana penyaluran nominal kecil pada wilayah dengan utilitas marjinal modal yang masih tinggi merupakan strategi paling efisien.

Nilai BCR  $< 1$  dalam penelitian ini perlu ditafsirkan dengan hati-hati. Dibandingkan dengan Istari (2014) yang memperoleh BCR 2,44 pada program PNPM-MP, perbedaan disebabkan oleh periode pengukuran yang lebih panjang (lima tahun) dan karakteristik program infrastruktur yang manfaatnya bersifat multiplier kolektif, sementara penelitian ini hanya mengukur manfaat satu tahun atas bantuan modal individual. Selain itu, sejalan dengan teori perangkap kemiskinan Chambers dalam Maipita (2014), kelayakan program bantuan sosial tidak dapat dinilai semata dari angka finansial, sebab program UEP juga berkontribusi mengurangi unsur kelemahan jasmani dan isolasi melalui kemampuan penerima membiayai kesehatan dan pendidikan.

### **Dimensi Kesejahteraan dan Penerimaan Sosial**

Dari dimensi kesejahteraan ( $U_2$ ), hampir seluruh penerima (98,2 persen) memiliki akses mudah terhadap layanan kesehatan dengan rata-rata pengeluaran kesehatan yang relatif kecil (Rp57.343 per bulan), sebagian besar tertanggung oleh Jaminan Kesehatan Nasional. Pada aspek pendidikan, 89,5 persen responden menyatakan anak memperoleh akses pendidikan memadai dengan rata-rata pengeluaran Rp615.000 per bulan, yang menunjukkan bahwa peningkatan pendapatan dari UEP turut menopang kemampuan membiayai pendidikan anak. Selain itu, sasaran program telah tepat menjangkau kelompok rentan, terlihat dari 86,0 persen responden yang juga menerima bantuan sosial lain seperti BPNT dan PKH.

Dari sisi persepsi, sebanyak 94,7 persen responden menyatakan kondisi ekonomi membaik dan 96,5 persen berharap program dilanjutkan, sejalan dengan temuan Tito Surogo et al. (2020). Tingginya tingkat kepuasan dan harapan keberlanjutan ini menjadi legitimasi sosial yang kuat. Dengan demikian, meskipun secara finansial jangka pendek BCR keseluruhan masih di bawah 1, program UEP telah menunjukkan kelayakan pada wilayah dan nominal tertentu serta layak secara sosial, sehingga direkomendasikan untuk dilanjutkan dengan mengoptimalkan nominal Rp10.000.000, memperluas cakupan di wilayah perdesaan, dan memperkuat pendampingan usaha agar manfaat terakumulasi dalam jangka panjang.

### **D. Penutup**

Program bantuan UEP memberikan nilai manfaat ekonomi yang positif bagi penerima, ditunjukkan oleh peningkatan pendapatan rata-rata sebesar Rp842.982 per bulan atau 44,3 persen dari pendapatan awal, di mana 89,5 persen responden mengalami peningkatan dan total nilai manfaat tahunan mencapai Rp576.600.000. Manfaat terbesar diperoleh penerima di Kabupaten Sigi dan penerima dengan nominal bantuan Rp10.000.000, yang menegaskan bahwa modal bernominal lebih kecil pada wilayah berpendapatan awal rendah memberikan dampak marjinal yang lebih besar.

Berdasarkan analisis Benefit-Cost Ratio, program UEP secara keseluruhan menghasilkan BCR 0,6267 ( $< 1$ ) sehingga belum layak secara ekonomi murni dalam periode satu tahun. Namun kelayakan bersifat kontekstual, di mana Kabupaten Sigi mencatat BCR 1,0480 ( $> 1$ ) dan kombinasi Kabupaten Sigi dengan nominal Rp10.000.000 paling efisien dengan BCR 1,2600. Ditinjau dari dimensi kesejahteraan dan persepsi penerima yang sangat positif, program UEP dinilai layak secara sosial dan direkomendasikan untuk dilanjutkan dengan penyempurnaan, yaitu mengoptimalkan nominal yang paling efisien, memperluas cakupan di wilayah perdesaan, serta memperkuat pendampingan usaha yang berkelanjutan agar manfaat ekonominya terakumulasi dan nilai BCR meningkat melampaui titik kelayakan dalam jangka panjang.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Girikallo, A. S., Mahdalena, Udin, A. F., Mukhyi, M. A., Asrun, L. O., Casriyanti, Suwastika, I. W. K., Anawati, S., Aslindar, D. A., & Fauza, M. (2023). *Buku Ajar Mikro Ekonomi* (Edisi I). PT Literasi Nusantara Abadi Grup.
- Analisis peran program bantuan modal usaha ekonomi produktif (UEP) kepada keluarga rentan oleh Dinas Sosial menurut perspektif ekonomi Islam* [Skripsi]. IAIN Curup. Febrina, M. (2022).

- Isnaeni, Syam, A., Hasan, M., & Said, M. I. (2022). Implementasi Program Usaha Ekonomi Produktif (UEP) sebagai upaya peningkatan ekonomi masyarakat Kelurahan Sibatua, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep. *Intelektiva*, 4(3), 9–16.
- Istari, P. W. (2014). Analisis manfaat dan biaya program PNPM Mandiri Perdesaan. *Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan*, 15(1), 51–62.
- Kapioru, C. (2019). Efektifitas perguliran modal penguatan dan pengembangan usaha ekonomi produktif Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (PEM) di Kota Kupang. *Jurnal Inovasi Kebijakan*, 6, 1–15.
- Kuncoro, M. (2014). *Ekonomika pembangunan: Masalah, kebijakan, dan politik*. Erlangga.
- Maipita, I. (2014). *Mengukur kemiskinan dan distribusi pendapatan*. UPP STIM YKPN.
- Mangkoesoebroto, G. (1998). *Ekonomi publik* (Edisi 3). BPFE.
- Nurrahma, F., Khotimah, K., & Islamay, S. V. (2022). Dampak Program Bantuan Produktif Usaha Mikro terhadap pendapatan pelaku usaha mikro. *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan*, 5(1), 69–78.
- Olii, F., Popoi, I., & Bahsoan, A. (2021). Analisis Program Usaha Ekonomi Produktif Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara. *Oikos Nomos: Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis*, 14(1), 1–17.
- Putra, S. W., Abubakar, M., & Abubakar, R. (2021). Efektivitas Bantuan Produktif Usaha Mikro di masa pandemi Covid-19 pada Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bener Meriah Tahun 2020. *Jurnal Transparansi Publik*, 1(1), 11.
- Sembor, A., Riani, I. A. P., Setyowati, T. P. U., & Aminah, S. (2017). Dampak program bantuan keuangan usaha ekonomi produktif (UEP) kepada masyarakat di Kabupaten Lanny Jaya. *Kajian Ekonomi dan Studi Pembangunan*, 2(1), 41–60.
- Sen, A. (1999). *Development as freedom*. Alfred A. Knopf, Inc.
- Sugiyono. (2019). *Metodologi penelitian kuantitatif dan kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Syamsul Rizal. (2023). Pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui Usaha Kerupuk Ikan Madani. *Dakwatul Islam*, 8(1), 75–90.
- Tito Surogo, Sunaryati, R., & Masliani. (2020). Evaluasi pengembangan usaha ekonomi produktif di Desa Sebangau Mulya sekitar kawasan Taman Nasional Sebangau. *Journal of Environment and Management*, 1(3), 204–211.
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2014). *Pembangunan ekonomi* (Edisi 11). Erlangga.
- Wirawan, I. M. O. (2015). *Efektivitas Program Bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dalam upaya peningkatan kesempatan kerja dan pendapatan rumah tangga miskin di Kecamatan Kerambitan* [Tesis]. Universitas Udayana.
- Yosada, K. R. (2019). Dampak Program Usaha Ekonomi Produktif (UEP) terhadap kesejahteraan masyarakat di Desa Pelimping Baru Kecamatan Kelam Permai. *JURKAMI: Jurnal Pendidikan Ekonomi*, 4(2), 111–119.
- Zakaria, J. (2012). *Pengantar teori ekonomi mikro*. Umitoha.